

FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERADAAN *MANAGEMENT RISK COMMITTEE* PADA PERBANKAN DI INDONESIA

Meilisa Anggraini (200812047)

ABSTRACT

This study aims to identify the existence of Risk Management Committee on banking in Indonesia. This Study using the determinants of the existence of the Risk Management Committee which are independent commissioners, board size, auditor reputation, complexity and size of the company.

The data used in this study is a data banking on Indonesia Stock Exchange (BEI) from 2009 to 2011. The sample collection using purposive sampling and the resulted 91 sample Bank as a final sample. In this study using logistic regression analysis.

The results of this study state that independent commissioner, board size, auditor reputation and complexity have not significant relationship with the existence of the Risk Management Committee. And size of the company has a positive and significant relationship with existence Risk Management Committee.

Keywords : Risk Management Committee, banking, good corporate

Tahun 2010

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia perbankan yang pesat menyebabkan resiko yang kompleks bagi Bank. Menurut Widigdo Sukarman (2007), Bank merupakan lembaga intermediasi yang menyimpan dana dari masyarakat dan menyalurkannya berupa kredit, sifat usaha Bank yang berdasarkan tingkat kepercayaan dari nasabah dengan modal ekuitas yang kecil merupakan usaha yang *highly leveraged*. Maka resiko usaha Bank lebih besar dibandingkan dengan perusahaan sektor riil yang memiliki rasio modal lebih besar. Karena hal tersebut Bank Indonesia memberikan kebijakan mengenai permodalan yang ketat guna menyangga kemungkinan terjadi kerugian akibat resiko. Dalam Basel I tahun 1988, mensyaratkan standar modal minimum bagi Bank sebesar 8% untuk pengukuran resiko kredit.

Komite Basel kemudian mengembangkan kerangka persyaratan modal dengan merancang Basel II, dengan perhitungan yang lebih sensitif terhadap resiko serta peningkatan kualitas terhadap manajemen resiko di Bank. Tiga pilar yang terdapat pada Basel II yaitu *minimum capital requirement, supervisory review process, market discipline*. Menurut Bank Indonesia dengan adanya Basel II dapat meningkatkan keamanan dan kesehatan sistem keuangan dengan adanya tiga pilar tersebut. Karena dalam Basel II merupakan penyempurnaan dari Basel I dimana modal Bank tidak hanya dihadapkan pada

resiko kredit tapi juga pada *market risk*, *credit risk*, *operational risk*, dan *other risk* (Sukarman, 2007).

Dilihat dari banyaknya eksposur resiko pada Bank, oleh karena itu pengawasan dan manajemen resiko pada Bank perlu ditingkatkan lagi, dan dewan komisaris memiliki peran yang penting dalam pengawasan dan manajemen resiko dalam *good corporate governance* (GCG). Dalam penelitian Kaihatu (2006), secara definisi GCG merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*. Krisis yang terjadi pada tahun 1997 salah satunya diakibatkan oleh lemahnya pengawasan yang menjadi tanggung jawab dewan komisaris terhadap direksi perusahaan. Karena tugas utama dewan komisaris adalah mengawasi pelaksanaan kebijakan dan memberikan nasihat kepada direksi.

Semakin kompleksnya resiko akan meningkatkan GCG dan fungsi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian resiko Bank. Esensi dari *corporate governance* adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku (Kaihatu, 2006). Dalam penelitiannya, lebih lanjut menyatakan bahwa *Corporate governance structure* pada perbankan terdiri atas *fit and proper test* bagi pihak pejabat perbankan dimana untuk meningkatkan kompetensi dan integritas manajemen, tidak ada hubungan kekerabatan antara dewan komisaris dan pihak direksi untuk menjaga independensi manajemen bank, dan perlu adanya peningkatan fungsi dari audit bank.

Menurut Muntoro (2006), anggota dewan dalam melaksanakan tugas diharapkan untuk bersikap independen dan menaruh kepentingan perusahaan sebagai fokus utama.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam menjalankan GCG, tugas komisari dilakukan melalui komite-komite seperti komite audit, komite remunasi, komite manajemen resiko dan komite lainnya. Di mana dalam setiap komite tersebut terdapat anggota komisaris dan anggota lainnya. Semakin banyak komite maka semakin banyak anggota komisaris yang dibutuhkan untuk mengisi keanggotaan komite-komite tersebut.

Pada tahun 2003 Bank Indonesia menyiapkan peraturan mengenai Penerapan Manajemen Resiko yang diatur pada PBI No. 5/8/PBI/2003 yang diberlakukan per tanggal 1 Januari 2004. Pembentukan komite Manajemen Resiko terhadap perbankan diregulasi sangat ketat oleh Bank Indonesia, dengan mengenakan sanksi apabila tidak dilaksanakan. Selain pembentukan komite Manajemen Resiko dalam peraturan tersebut juga dibentuk satuan kerja Manajemen Resiko yang bertanggung jawab langsung kepada direktur utama atau kepada direktur yang ditunjuk.

Dalam pasal 16 PBI No. 5/8/PBI/2003 dijelaskan bahwa bank wajib membentuk komite Manajemen Resiko dan satuan kerja Manajemen Resiko dalam rangka pelaksanaan proses dan sistem Manajemen Resiko yang efektif. Komite dan satuan kerja yang dimaksud diharapkan dapat membantu perbankan dalam mengelola resiko yang muncul. Pengendalian resiko dimaksudkan agar aktivitas yang dilakukan perbankan tidak menimbulkan kerugian yang melampaui kemampuan bank maupun yang dapat mengganggu kelangsungan usaha bank.

Komite Manajemen Resiko sekurang-kurangnya terdiri atas mayoritas direksi dan pejabat eksekutif terkait sesuai dengan pasal 17 dalam PBI No. 5/8/PBI/2003. Dimana wewenang dan tanggung jawab dari komite Manajemen Resiko meliputi penyusunan kebijakan, strategi dan pedoman penerapan Manajemen Resiko, serta perbaikan atau

penyempurnaan pelaksanaan Manajemen Resiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan. Komite manajemen Resiko juga menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal.

Hasil dari satuan kerja Manajemen Resiko berupa laporan profil resiko yang diserahkan kepada Bank Indonesia sesuai dengan yang diserahkan kepada direktur utama dan komite Manajemen Resiko. Sistem informasi Manajemen Resiko mencakup laporan mengenai eksposur resiko, kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur serta penetapan limit resiko, dan realisasi pelaksanaan Manajemen Resiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Selain laporan profil resiko, Bank wajib menyampaikan laporan produk dan aktivitas baru kepada Bank Indonesia. Laporan lain yang wajib diserahkan oleh Bank adalah laporan mengenai potensi munculnya kerugian yang terjadi pada Bank. Laporan-laporan yang dikirimkan oleh Bank kepada Bank Indonesia sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi (*transparencey*) dalam GCG. Hal ini dijelaskan pada PBI No. 5/8/PBI/2003 pasal 12, pasal 25 dan pasal 26.

Dalam Komite Manajemen Resiko komisaris dan direksi merupakan esensi terpenting, karena memiliki wewenang dan tanggung jawab mengenai kebijakan, dimana direksi menyusun kebijakan dan strategi manajemen resiko serta dewan komisaris mengevaluasi kebijakan tersebut. Dewan komisaris independen diperlukan untuk meningkatkan independensi dewan komisaris terhadap *shareholder*, bukan hanya sebagai pemenuhan peraturan. Dalam penelitian yang dilakukan Muntoro (2006) terdapat pedoman GCG yang disusun oleh Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* bahwa anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perseroan paling tidak sebanyak 20%. Dalam menetapkan dewan komisaris harus memperhatikan ukuran dewan direksi, dijelaskan oleh

Muntoro bahwa sebaiknya jumlah anggota dewan komisaris paling tidak sama dengan jumlah anggota dewan direksi. Lebih lanjut, Muntoro menjelaskan bahwa ukuran dewan komisaris juga ditentukan oleh resiko menyeluruh yang dihadapi perusahaan.

Dengan adanya audit eksternal sesuai dengan prakter *good corporate governance* dalam komite Manajemen Resiko. Auditor *Big Four* dianggap lebih baik karena reputasi dari kantor akuntan publik yang sudah terkenal dan tingkat pengawasan yang baik. Dengan menggunakan auditor yang terpercaya dapat memelihara kualitas audit dan perlindungan akan reputasi mereka (Subramaniam et al, 2009).

Pembentukan komite Manajemen Resiko disesuaikan dengan kompleksitas usaha Bank tersebut. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Subramaniam (2009) dijelaskan bahwa kompleksitas perusahaan yang besar dapat meningkatkan resiko dalam level yang berbeda sehingga dibutuhkan mekanisme pengawasan resiko yang lebih besar. Hal lain seperti ukuran Bank juga mempengaruhi pembentukan komite Manajemen Resiko, Bank dengan skala besar akan meningkatkan GCG lebih baik dari Bank dengan skala kecil.

Penelitian mengenai komite Manajemen Resiko terhadap industri perbankan dan finansial masih jarang ditemui, berbeda dengan industri non finansial. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Andarini dan Januarti (2010) yang melakukan penelitian terhadap perusahaan non finansial yang listing di BEI mengenai hubungan karakteristik dewan komisaris dan perusahaan terhadap pengungkapan *risk management committee*. Hasilnya adalah hanya ukuran perusahaan secara signifikan berhubungan positif dengan keberadaan komite Manajemen Resiko. Penelitian ini mereplikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Andarini dan Januarti (2010) yang diaplikasikan pada perbankan di Indonesia.

Walaupun demikian penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, dikarenakan industri yang berbeda. Pada penelitian ini melihat analisis sistematis hubungan antara keberadaan komite Manajemen Resiko terhadap presentase komisaris independen, ukuran dewan, reputasi auditor, kompleksitas bank dan ukuran perusahaan sebagai variabel yang akan diteliti. Berdasarkan uraian tersebut judul penelitian ini adalah **“Faktor-Faktor Penentu Keberadaan Management Risk Committee Pada Perbankan Di Indonesia”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, faktor – faktor yang mempengaruhi komite manajemen resiko adalah presentase komisaris independen, ukuran dewan, reputasi auditor, kompleksitas bank dan ukuran perusahaan. Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah diuraikan sebagai berikut :

1. Apakah proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap komite manajemen resiko?
2. Apakah ukuran dewan berpengaruh positif terhadap komite manajemen resiko?
3. Apakah reputasi auditor berpengaruh positif terhadap komite manajemen resiko?
4. Apakah kompleksitas bank menjadi penentu komite manajemen resiko?
5. Apakah ukuran perusahaan menjadi penentu komite manajemen resiko?

1.3 Pembatasan Masalah

Adapun pembatasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini dilakukan pada industri perbankan yang terdaftar di BEI

2. Penelitian hanya pada Bank Umum yang terdaftar pada BEI

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah menguji secara empiris :

1. Hubungan antara komisaris independen terhadap komite Manajemen Resiko
2. Hubungan antara ukuran dewan dengan komite Manajemen Resiko
3. Hubungan reputasi auditor dengan komite Manajemen Resiko
4. Hubungan kompleksitas bank sebagai penentu komite Manajemen Resiko
5. Hubungan ukuran perusahaan sebagai penentu komite Manajemen Resiko

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan berguna antara lain :

1. Bagi pembaca, semoga informasi dalam penelitian ini dapat memberikan referensi dan pemahaman mengenai komite Manajemen Resiko yang terdapat pada Bank.
2. Bagi dunia ilmu pengetahuan, semoga menjadi tambahan penelitian mengenai komite Manajemen Resiko terhadap perbankan di Indonesia.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab, yaitu :

- Bab 1 adalah pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat masalah.

- Bab 2 adalah landasan teori yang menjelaskan mengenai teori-teori yang bersangkutan dengan penelitian, kerangka pemikiran dan hasil penelitian sebelum.
- Bab 3 adalah metodologi penelitian yang menjelaskan mengenai objek penelitian, metode pengumpulan data serta metode analisis data.
- Bab 4 adalah analisis dan pembahasan yang menjelaskan mengenai gambaran umum objek penelitian serta analisis dari hasil penelitian.
- Bab 5 adalah kesimpulan dan saran yang menjelaskan mengenai rangkuman dari penelitian dan saran yang berhubungan dengan penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Teori Agensi

Hubungan agensi ada ketika pemilik modal yaitu investor (prinsipal) menyewa manajer (agen) untuk melaksanakan suatu jasa dan mendelegasikan wewenang untuk membuat keputusan kepada agen tersebut. Asimetri informasi merupakan situasi ketika prinsipal tidak memiliki informasi yang mencukupi mengenai kinerja agen, prinsipal tidak pernah dapat merasa pasti bagaimana usaha agen memberikan kontribusi pada hasil aktual perusahaan. Sedangkan tambahan informasi yang mungkin dimiliki oleh agen disebut dengan informasi pribadi. Perbedaan preferensi antara prinsipal dan agen serta informasi pribadi agen dapat menyebabkan agen tersebut salah menyajikan informasi kepada prinsipal. Salah penyajian ini diistilahkan dengan bahaya moral, dimana seorang agen yang dikendalikan termotivasi untuk salah menyajikan informasi karena sifat sistem pengendalian (Anthony dan Govindarajan, 2005).

Agency cost adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemegang saham biasa suatu perusahaan ketika manajemen perusahaan tersebut membuat keputusan yang bukan untuk

kepentingan pemegang saham maupun perusahaan tetapi untuk kepentingan manajemen perusahaan tersebut (Titman,Keown,Martin., 2008).

Akibat adanya kemungkinan informasi yang tidak seimbang (asimetris informasi) dapat terjadi dua permasalahan karena adanya kesulitan prinsipal untuk memantau tindakan agen. Dua permasalahan ini yaitu (Jensen dan Meckling, 1976) :

1. *Moral Hazard*, yaitu permasalahan yang muncul jika agen tidak melaksanakan hal-hal yang disepakati bersama dalam kontrak kerja dengan prinsipal.
2. *Adverse Selection*, yaitu keadaan dimana principal tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh agen didasarkan pada informasi yang telah diperolehnya atau terjadi karena kelalaian tugas.

Untuk merendam tindakan para agen yang tidak sesuai dengan kepentingannya, principal memiliki dua cara yaitu :

1. Pemantauan

Prinsipal dapat merancang sistem pengendalian yang memantau tindakan agen, pemantauan akan lebih efektif jika tugas agen terdefinisi dengan baik atau mudah dipantau (Anthony dan Govindarajan, 2005). Menurut Jensen dan Meckling (1976) ; Subramaniam, et al. (2009) dengan cara mengawasi perilaku agen dengan mengadopsi fungsi audit dan mekanisme *corporate governance* lain yang dapat meluruskan kepentingan agen dengan kepentingan prinsipal.

2. Kontrak Insentif

Semakin besar penghargaan yang diterima agen bergantung pada ukuran kinerja, semakin banyak insentif yang ada bagi agen tersebut untuk memperbaiki ukuran. Oleh karena itu, prinsipal sebaiknya mendefinisikan ukuran kinerja sedemikian rupa sehingga hal tersebut memajukan kepentingannya, ketika kontrak yang diberikan memotivasi agen untuk bekerja bagi kepentingan perusahaan hal ini disebut dengan keselarasan tujuan (Anthony dan Govindarajan, 2005). Menyediakan insentif kepegawaian yang menarik kepada agen dan mengadakan struktur *reward* yang dapat membujuk para agen untuk bertindak sesuai dengan kepentingan terbaik principal Jensen dan Meckling (1976) ; Subramaniam, et al. (2009).

Kegagalan pemantauan membuat investor menghadapi *agency costs*, yaitu resiko dimana pemilik perusahaan akan mengambil tindakan dengan menggunakan uang dari investor atau prinsipal yang berlawanan dengan perjanjian pada kontrak efek. Biaya pemantauan merupakan bagian dari *agency costs*. Semakin sulit untuk mengumpulkan informasi, semakin mungkin bahwa kontrak akan rusak (Saunders dan Cornett, 2011). Jensen dan Meckling (1976) menyebutkan bahwa ada tiga jenis biaya yang timbul karena *agency costs* yaitu :

1. Biaya Pengawasan (*monitoring costs*), terjadi karena principal membatasi agen dari kepentingannya. Biaya ini dirancang untuk membatasi aktivitas-aktivitas yang menyimpang yang dilakukan oleh agen.
2. Biaya Insentif Kepegawaian, biaya ini dihabiskan oleh agen untuk menjamin bahwa agen tidak akan melakukan kegiatan yang merugikan principal.

3. Kerugian Residu (*residual loss*), yang merupakan nilai uang ekuivalen dengan pengurangan kesejahteraan yang dialami oleh principal akibat tindakan agen yang tidak sesuai dengan kepentingannya.

Teori agensi biasa digunakan untuk meneliti mengenai *corporate governance*, khususnya mengenai keberadaan komite. Hal ini dikarenakan pentingnya pemantauan demi terwujudnya *good corporate governance* melalui pengawasan internal dan eksternal (Andarini dan Januarti, 2010). Pembentukan komite diprediksi ada ketika situasi biaya agensi yang cenderung tinggi misalnya tingkat leverage tinggi dan ukuran perusahaan yang besar (Subramaniam, et al., 2009).

2.1.2 Komisaris Independen

Menurut Muntoro (2006), adanya komisaris independen diperlukan untuk meningkatkan independensi dewan komisaris terhadap kepentingan pemegang saham (mayoritas) dan menempatkan kepentingan perusahaan di atas kepentingan lainnya. Dan juga jumlah komisaris independen harus sebanding dengan komisaris non independen agar ada saat pemungutan suara didapatkan hasil yang adil.

Proporsi anggota independen dalam dewan komisaris dapat dikatakan sebagai indikator dewan dari manajemen. Kehadiran komisaris independen dalam dewan komisaris akan menambah kualitas aktivitas pengawasan dalam perusahaan, karena tidak ada unsur terafiliasi dengan perusahaan sebagai pegawai dan hal ini merupakan keterwakilan independen dari kepentingan *shareholder* (Pincus, et al, 1989 dalam Subramaniam, et al., 2009)

2.1.3 Ukuran Dewan Direksi

Membangun dewan komisaris yang efektif dimulai dari proses rekrutmen dan orientasi. Rekrutmen anggota dewan komisaris adalah proses kunci awal yang sangat krusial dalam membangun dewan komisaris yang efektif (Vennat, 1995 dalam Muntoro, 2006). Ukuran adalah jumlah pas dari anggota dewan komisaris, termasuk ketuanya, untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Ukuran yang pas ini dipengaruhi oleh berbagai hal, sebagai berikut (Muntoro, 2006):

1. Ukuran dewan direksi
2. Industri dan jenis keahlian yang dibutuhkan
3. Overall risk yang dihadapi
4. Komite yang ada

Menetapkan ukuran dewan komisaris harus memperhatikan ukuran dewan direksi, karena dalam proses rapat yang berlangsung dalam membahas suatu masalah strategis, diperlukan proporsi yang sama atau seimbang sehingga tidak ada kalah suara dalam penyelesaian masalah. Menurut Muntoro (2006) ada tiga karekteristik utama yang diperhatikan dalam melihat komposisi dewan komisaris, yaitu : 1.) kesenioritan (atau kejunioran) dari anggota dewan komisaris, 2.) jenis keahlian yang dimiliki dan 3.) komisaris independen versus komisaris non-independen.

Lebih lanjut dalam penelitian Muntoro (2006), bahwa anggota senior diperlukan karena mereka dianggap sudah matang, sangat berpengalaman di bidang manajemen dan bijaksana dalam berfikir dan mengambil keputusan. Namun apabila seluruh dewan komisaris beranggotakan senior hasilnya akan kurang efektif, terutama pada lingkungan yang cepat berubah. Karena kelemahan anggota senior adalah kurang peka terhadap perubahan

lingkungan. Anggota junior akan berdampak positif bagi dewan komisaris dikarenakan semangat, kreatifitas, keingintahuan yang besar serta kepekaan terhadap perubahan lingkungan dan kemampuan analisis teknik yang berasal dari pemahaman mengenai alat analisis dan peralatan manajerial yang mutakhir. Tetapi kelemahan apabila seluruh dewan komisaris merupakan anggota junior akan menghasilkan perubahan yang arahnya tidak selalu jelas, karena kurangnya pengalaman.

Kemudian ukuran dan komposisi dewan komisaris membantu dalam keefektifan kerja dewan komisaris, ukuran yang tidak seimbang dengan jumlah direksi yang lebih banyak akan menyebabkan komisaris menghadapi kesulitan ketika bernegosiasi dengan dewan komisaris (Muntoro, 2006).

2.1.4 Reputasi Auditor

Menurut Meutia (2004), audit merupakan suatu proses mengurangi ketidakselarasan informasi yang terdapat antara manajer dan pemegang saham. Dimana auditor sebagai pihak luar memberikan pengesahan atas laporan keuangan perusahaan tersebut. Para pengguna laporan yaitu pemegang saham akan mengambil keputusan berdasarkan pada laporan yang telah dibuat oleh auditor mengenai laporan keuangan tersebut. Oleh karena itu kualitas audit merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh para auditor dalam proses mengaudit.

Menurut Sanjaya (2008), Auditor *Big Four* memiliki keahlian dan reputasi yang tinggi dibanding dengan auditor non *big four*. Maka daripada itu, auditor *big four* berusaha untuk mempertahankan reputasinya dengan cara menjaga kepercayaan masyarakat dan memeberi perlindungan kepada publik.

Auditor *Big Four* adalah Ernst & Young, Delloite Touche Tohmatsu, KPMG Peat Marwick, dan Pricewaterhouse Coopers.

2.1.4 Kompleksitas Perusahaan

Menurut Subramaniam, et al. (2009), kompleksitas perusahaan dapat dilihat dari jumlah segmen bisnis yang dimiliki, seperti dapat dilihat dari jumlah anak perusahaan. Kompleksitas yang semakin besar meningkatkan resiko di beberapa level termasuk resiko operasional dan resiko teknologi, yang membutuhkan pengawasan resiko yang lebih baik.

Kompleksitas usaha yang dimaksud dalam PBI No. 5/8/2003 antara lain adalah keragaman jenis transaksi/produk/jasa dan jaringan usaha bank tersebut.

2.1.5 Ukuran Perusahaan

Menurut Saunders (2011) , penekanan pada perdagangan efek dan penjamin emisi maka ukuran industri biasa dilihat dari modal ekuitas perusahaan – perusahaan yang berpartisipasi dalam layanan keuangan. Ekuitas atau modal investasi digunakan sebagai patokan paling umum dari ukuran relatif.

Menurut Machfoedz (1994), klasifikasi ukuran perusahaan dalam berbagai cara , antara lain : total aktiva,log size,nilai pasar saham, dan lain-lain. Pada dasarnya ukuran perusahaan terbagi dalam tiga kategori berdasarkan total asset perusahaan, yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium-size*) dan perusahaan kecil (*small firm*).

2.1.6 Manajemen Resiko Bank

Perbankan merupakan resiko manajemen, dimana bank menerima resiko sekaligus untuk mendapatkan keuntungan. Manajemen Bank harus menyeimbangkan antara resiko dan keuntungan dalam memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham (Gup dan Kolari, 2005). Manajemen resiko didefinisikan sebagai suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan resiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses. Proses Manajemen Resiko merupakan tindakan berkesinambungan, yaitu (Ferry Idroes, 2008) :

1. Identifikasi dan Pemetaan Resiko, dengan menetapkan kerangka kerja untuk implementasi strategi resiko secara keseluruhan, menentukan definisi kerugian, menyusun dan melakukan implementasi mekanisme pengumpulan data serta membuat pemetaan kerugian ke dalam kategori resiko yang dapat diterima dan tidak dapat diterima.
2. Kuantifikasi/Menilai/Melakukan Peringkat Resiko dengan aplikasi teknik pemodelan dalam mengukur resiko, perluasan dengan memanfaatkan tolak ukur (*benchmarking*), permodelan (*modeling*), dan peramalan (*forecasting*) yang berasal dari luar organisasi/eksternal.
3. Menegaskan Profil Resiko dan Rencana Manajemen Resiko, yaitu dengan mengidentifikasi selera resiko organisasi (*risk appetite*) dan identifikasi visi stratejik (*strategic vision*). Penghindar resiko (*risk averter*) tidak bersedia menerima resiko dengan tingkat tinggi. Sebaliknya, pencari resiko (*risk seeker*) bersedia menerima resiko tinggi untuk mendapatkan hasil yang lebih tinggi. Untuk visi stratejik yang agresif bersedia menerima resiko tinggi untuk mendapatkan hasil yang lebih tinggi, biasanya untuk organisasi dalam

tahap pertumbuhan. Sebaliknya visi strategik yang konservatif tidak bersedia menerima resiko tingkat tinggi, biasanya pada organisasi yang telah mapan.

4. Solusi Resiko/Implementasi Tindakan terhadap Resiko dengan cara hindari (*avoidance*), alihkan (*transfer*), mitigasi resiko (*mitigate risk*) dan menahan resiko residual (*retentionof residual risk*).
5. Pemantauan dan Kaji Ulang Resiko dengan cara bahwa anggota organisasi yakin bahwa implementasi manajemen resiko berjalan dengan baik. Dan melakukan evaluasi terhadap implementasi strategi manajemen resiko.

Peraturan Bank Indonesia no. 5/8/PBI/2003 tentang “Penerapan manajemen resiko untuk bank umum” merupakan wujud keseriusan Bank Indonesia dalam masalah manajemen resiko perbankan. Keseriusan tersebut lebih dipertegas lagi dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia No.7/25/PBI/2005 tentang “Sertifikasi manajemen resiko bagi pengurus dan pejabat bank umum”, yang mengharuskan seluruh pejabat bank dari tingkat terendah hingga tertinggi memiliki sertifikasi manajemen resiko yang sesuai dengan tingkat jabatannya. Peraturan yang diterapkan untuk bank umum, yang meliputi (Hardanto, 2006) :

1. Bank yang berbadan hukum PT
2. Bank yang dibentuk berdasarkan undang-undang pemerintah daerah (BPD)
3. Bank yang didirikan dengan undang-undang koperasi
4. Cabang dari bank asing

Bank Indonesia mewajibkan struktur manajemen resiko dari seluruh Bank untuk mencakup resiko-resiko sebagai berikut: resiko pasar, resiko kredit, resiko operasional dan

resiko likuiditas. Pengertian resiko tersebut adalah sebagai berikut (Ferry Indroes,2008; Saunders dan Cornett,2011 ; Gup dan Kolari,2005) :

1. Resiko Pasar dapat didefinisikan sebagai resiko yang terkait dengan ketidakpastian laba sebuah investasi keuangan pada portofolio perdagangan, yang disebabkan oleh perubahan yang ekstrim dalam kondisi pasar seperti harga asset,suku bunga,volatilitas pasar dan likuiditas pasar.
2. Resiko Kredit dapat didefinisikan sebagai resiko terhadap pendapatan dan modal yang dapat terjadi pada obligor sehubungan dengan perjanjian dengan Bank. Resiko ini biasanya mengenai pinjaman dan modal investasi, tetapi dapat terjadi juga karena derivative, nilai tukar asing dan penambahan bunga bank lainnya.
3. Resiko Likuiditas dapat terjadi karena sisi hutang atau sisi asset, sisi hutang terjadi jika deposan ingin menarik dana dalam jumlah besar dan manajer harus meminjam dana kepada bank lain atau dengan menjual asset. Penjualan asset dibawah harga pasar disebut dengan *fire-sale prices*. Resiko likuiditas akibat sisi asset terjadi ketika pada *off balance sheet*, dimana bank memberikan *loan commitment* kepada nasabah, dan ketika nasabah mengajukan pada saat Bank tidak memiliki dana maka Bank harus menjual asset yang bersifat likuid maupun meminjam kepada bank lain dengan bunga yang tinggi.
4. Resiko Operasional adalah resiko yang terjadi pada pendapatan dan modal yang berhubungan dengan masalah pelayanan suatu produk bank. Resiko operasional meliputi tingkat efisien dan efektivitas seluruh pekerja

operasional termasuk manajemen sistem informasi, personal dan *internal-eksternal frauds*.

5. Resiko Hukum disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, kelemahan antara lain disebabkan oleh adanya tuntutan hukum , ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya suatu kontrak.
6. Resiko Reputasi antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negative yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negative terhadap bank.
7. Resiko Strategik antara lain disebabkan oleh adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat, atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal.
8. Resiko Kepatuhan disebabkan bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.

Bank yang memiliki ukuran dan kompleksitas usaha yang tinggi wajib menerapkan Manajemen Resiko untuk seluruh jenis resiko. Bank yang tidak memiliki ukuran dan kompleksitas usaha yang tinggi wajib menerapkan Manajemen Resiko sekurang-kurangnya untuk empat jenis resiko, yaitu resiko kredit, resiko pasar, resiko likuiditas, resiko operasional.

Menurut Gill dan Reed (1999) fungsi dari komisaris suatu Bank adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan arah tujuan dan formulasi kebijakan bank
2. Mengangkat manajemen bank

3. Membentuk komite-komite tertentu
4. Melaksanakan pengawasan terhadap kredit dan penanaman lain dalam arti untuk menilai apakah bank telah mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan
5. Memberikan masukan kepada manajemen pada saat pengambilan keputusan
6. Membantu bank dalam meningkatkan usaha bank dengan memanfaatkan hubungan dengan dunia perbankan
7. Melakukan review terhadap kegiatan usaha bank secara periodic, dengan melihat pada laporan-laporan yang diperoleh.

Manajemen resiko didefinisikan sebagai metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kualifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan resiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses. Manajemen resiko diperlukan untuk mendukung pencapaian tujuan, memungkinkan untuk melakukan aktivitas yang memberikan peluang yang jauh lebih tinggi dengan mengambil resiko yang lebih tinggi, mengurangi kesalahan fatal, menyadari bahwa resiko dapat terjadi pada setiap aktivitas dan tingkatan dalam organisasi sehingga setiap individu harus mengambil dan mengelola resiko masing-masing sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya (Ferry Idroes, 2008).

Untuk menerapkan Manajemen Resiko yang efektif diperlukan sistem informasi Manajemen Resiko yang mencakup laporan atau informasi mengenai (PBI No. 5/8/2003 Pasal 12) :

1. Eksposur resiko
2. Kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur serta penetapan limit
3. Realisasi pelaksanaan Manajemen Resiko dibandingkan dengan target yang diterapkan

Laporan atau informasi yang dihasilkan dari sistem informasi Manajemen Resiko wajib disampaikan secara rutin kepada Direksi.

Disampaikan pada Pasal 13 PBI No. 5/8/2003 bahwa Bank wajib menerapkan sistem engendalian intern secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada

seluruh jenjang organisasi Bank. Lebih lanjut dalam Pasal 14 PBI No. 5/8/2003 dijelaskan bahwa pelaksanaan sistem pengendalian intern sekurang-kurangnya mampu secara tepat waktu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi. Sistem pengendalian intern wajib memastikan :

1. Kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan atau ketentuan intern Bank
2. Tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna dan tepat waktu
3. Efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional
4. Efektivitas budaya resiko (*risk culture*) pada organisasi Bank secara menyeluruh

Sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Resiko dalam Pasal15 PBI No.5/8/2003 sekurang-kurangnya mencakup :

1. Kesesuaian sistem pengendalian intern dengan jenis dan tingkat resiko yang melekat pada kegiatan usaha bank
2. Penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantuan kepatuhan kebijakan, prosedur dan limit
3. Penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari satuan kerja operasional kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian
4. Struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha bank
5. Pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu
6. Kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku
7. Kaji ulang yang efektif, independen dan obyektif terhadap prosedur penilaian kegiatan operasional bank
8. Pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap sistem informasi manajemen
9. Dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap prosedur operasional, cakupan dan temuan audit, serta tanggapan pengurus bank berdasarkan hasil audit
10. Verifikasi dan kaji ulang secara berkala dan berkesinambungan terhadap kelemahan-kelemahan Bank yang bersifat material dan tindakan pengurus Bank yang memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

2.1.7 Management Risk Committee

Dewan direksi bank mempunyai kewajiban umum menciptakan struktur organisasi untuk mengelola risiko bank yang meliputi komite manajemen resiko dan unit manajemen resiko. Keanggotaan komite manajemen resiko terdiri dari mayoritas dewan direksi bersama-sama dengan para pejabat senior (executive officer) yang terkait (Ferry Idroes, 2008).

Komite manajemen resiko harus mampu menyediakan rekomendasi bagi direksi utama dalam beberapa hal:

1. Kebijakan resiko, strategi, dan aplikasi
2. Setiap perubahan proses sebagai hasil rekomendasi audit internal atau evaluasi lainnya dari proses manajemen resiko
3. Penjelasan kepada Bank Indonesia dan dewan direksi bank beberapa keputusan yang dibuat oleh bank yang bertentangan dengan kebijakan manajemen resiko.

Penelitian yang dilakukan oleh Subramaniam, et al. (2009), secara umum area tugas dan wewenang komite manajemen resiko adalah :

1. Mempertimbangkan strategi manajemen resiko organisasi
2. Mengevaluasi operasi manajemen resiko organisasi
3. Menaksir pelaporan keuangan organisasi
4. Memastikan bahwa organisasi dalam prakteknya memenuhi hukum dan peraturan yang berlaku

Dalam PBI No. 5/8/2003 bahwa dalam pelaksanaan manajemen resiko yang efektif , bank wajib membentuk komite manajemen resiko dan satuan kerja manajemen resiko. Dimana dalam komite manajemen resiko terdiri dari mayoritas direksi dan pejabat eksekutif terkait. Wewenang dan tanggung jawab komite manajemen resiko adalah memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama, yang meliputi :

1. Penyusunan kebijakan, strategi dan pedoman penerapan manajemen resiko
2. Perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan manajemen resiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan
3. Penetapan (*justification*) hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*).

Sedangkan dalam Pasal 18 PBI No. 5/8/2003 , ukuran satuan kerja manajemen resiko disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha bank serta resiko yang melekat pada Bank. Dan satuan kerja manajemen resiko harus independen terhadap satuan kerja operasional dan terhadap satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian intern. Serta satuan kerja bertanggung jawab langsung kepada direktur utama atau kepada direktur yang

ditugaskan secara khusus. Wewenang dan tanggung jawab satuan kerja Manajemen Resiko meliputi :

1. Pemantauan pelaksanaan strategi manajemen resiko yang telah disetujui oleh direksi
2. Pemantauan posisi resiko secara keseluruhan, per jenis resiko dan per jenis aktivitas fungsiona; serta melakukan *stress testing*
3. Kaji ulang secara berkala terhadap proses manajemen resiko
4. Pengkajian usulan aktivitas dan atau produk baru
5. Evaluasi terhadap akurasi model dan validitas data yang digunakan untuk mengukur resiko, bagi bank yang menggunakan model untuk keperluan intern
6. Memberikan rekomendasi kepada satuan kerja operasional (*risk taking unit*) dan atau kepada komite manajemen resiko, sesuai kewenangan yang dimiliki.

Dalam rangka pengelolaan resiko yang melekat pada produk dan aktivitas barum bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis. Pada Pasal 20 PBI No. 5/8/2003 , kebijakan dan prosedur meliputi :

1. Sistem dan prosedur dan kewenangan dalam pengelolaan produk dan aktivitas baru
2. Identifikasi seluruh resiko yang terkait dengan produk dan aktivitas baru
3. Masa uji coba metode pengukuran dan pemantauan resiko terhadap produk dan aktivitas baru
4. Sistem informasi akuntansi untuk produk dan aktivitas baru
5. Analisa aspek hukum untuk produk dan aktivitas baru.

Dalam Ferry Idroes (2008), Bank harus mendokumentasikan proses peluncuran produk dan jasa barumereka serta sistem dan prosedur yang mencakup otoritas yang relevan dengan manajemen yang terkait. Dokumentasi tersebut meliputi:

1. Peluncuran atau perubahan sistem, proses dan prosedur bagi implementasi dari produk dan jasa baru
2. Kewenangan yang terkait dengan produk sejak memperkenalkan produk dan jasa baru
3. Laporan menyelur yang terkait dengan resiko sehubungan dengan usulan produk dan jasa baru
4. Metode untuk mengukur dan memantau secara berkesinambungan terhadap resiko yang dihubungkan dengan produk dan jasa baru

5. Penilaian terhadap resiko hukum/legal yang dikaitkan dengan peluncuran produk dan jasa baru
6. Keterbukaan kepada nasabah tentang resiko melekat yang terdapat dalam produk dan jasa baru

Bank Indonesia telah menetapkan bahwa setiap bank harus memberikan laporan-laporan yang terkait dengan manajemen resiko. Laporan-laporan yang dimaksud adalah sebagai berikut (Ferry Idroes, 2008):

a) Laporan Profil Resiko

Bank harus melaporkan profil resiko mereka kepada Bank Indonesia dan laporan tersebut harus berisi informasi yang sama dengan yang dibuat bagian manajemen resiko untuk kepala manajemen resiko dan komite manajemen resiko. Laporan profil resiko harus disajikan setiap triwulan, yaitu Maret, Juni, September dan Desember. Laporan ini harus disampaikan ke Bank Indonesia dalam tujuh hari pada setiap akhir triwulan.

b) Laporan Produk dan Jasa Baru

Bank harus melaporkan produk dan jasa baru untuk nasabah kepada Bank Indonesia. Laporan harus meliputi semua produk dan jasa baru dan menyampikan kepada Bank Indonesia. Laporan produk dan jasa baru harus disajikan setiap triwulan, yaitu Maret, Juni, September, dan Desember. Laporan ini harus disampaikan ke Bank Indonesia dalam tujuh hari pada setiap akhir triwulan.

c) Laporan Kerugian Keuangan yang Signifikan

Bank yang mencatat kerugian keuangan yang signifikan harus melaporkan secepatnya kepada Bank Indonesia.

d) Laporan Publikasi dan Akuntansi

Dalam kaitan dengan transparansi bank harus mempublikasikan informasi yang cukup untuk mencakup strategi dan kebijakan manajemen resiko yang diambil, kesesuaian limit yang relevan terhadap resiko, sebagai tambahan terhadap resiko terhadap informasi mengenai kondisi keuangan bank yang bersangkutan. Semua laporan yang dipublikasikan harus disetujui oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia mempunyai kekuasaan yang luas untuk mengenakan sanksi ke bank yang gagal dalam mematuhi peraturan perbankan. Sanksi tersebut dapat berupa penerapan denda sebagai sanksi administratif sampai dengan pencabutan izin dari bank yang bersangkutan.

2.2 Peneliti Terdahulu

Berbagai penelitian mengenai Komite Manajemen Resiko atau Risk Management Committee (RMC) di sektor non finansial telah dilakukan, berbeda dengan pengungkapan RMC pada perbankan di Indonesia yang masih jarang dilakukan. Isu mengenai pembentukan RMC pada sektor finansial memang didorong oleh Bank Indonesia sebagai salah satu komite untuk mencegah adanya eksposur resiko yang mungkin terjadi pada Bank, menghindari krisis tahun 1998-1999.

Pada penelitian yang dilakukan Subramaniam et,al (2009) untuk mengetahui keberadaan RMC dan tipe RMC yang dilakukan pada 300 perusahaan yang listing di bursa Australia. Dengan menggunakan karakteristik dewan dan karakteristik dari

perusahaan. Hasil yang diperoleh adalah adanya hubungan positif antara komisaris independen dan ukuran dewan yang lebih besar pada RMC yang berada pada perusahaan maupun yang terpisah.

Yatim (2009) melakukan penelitian mengenai hubungan antara struktur dewan dengan pembentukan RMC pada 690 perusahaan yang terdaftar di Bursa Malaysia periode tahun 2003. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah proporsi komisaris independen dan CEO independen berhubungan positif dengan pembentukan RMC yang terpisah dari komite audit.

Penelitian yang dilakukan Putri Andarini dan Indira Januarti (2010) berdasarkan dengan penelitian yang dilakukan Subramaniam et,al (2009), dilakukan untuk mengetahui keberadaan RMC dan keberadaan RMC yang terpisah dari perusahaan pada industri non finansial yang listing di BEI dari tahun 2007-2008 sebanyak 248 perusahaan. Penelitian ini dilakukan dengan melihat proporsi komisaris independen, ukuran dewan auditor eksternal, kompleksitas perusahaan, resiko pelaporan keuangan,leverage dan ukuran perusahaan. Hasil dari penelitian ini adalah, komisaris independen,ukuran dewan,reputasi auditor ,kompleksitas perusahaan dan leverage tidak berhubungan signifikan dengan keberadaan RMC dan RMC yang terpisah. Hanya ukuran perusahaan yang memiliki hubungan signifikan dengan keberadaan RMC dan RMC yang terpisah.

Penelitian yang dilakukan oleh Briana Dita Pratika (2011) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberadaan RMC pada perusahaan yang listing di BEI. Terdapat 100 perusahaan yang dipilih secara acak sebagai sampel, pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi logistic. Dan mendapatkan hasil bahwa

variabel independen yang berpengaruh secara signifikan terhadap keberadaan RMC adalah variabel *bigfour* auditor.

Yudiati Indah Setyarini (2011) menganalisa mengenai pengaruh karakteristik dewan komisaris dan karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan *Risk Management Committee*. Pengumpulan data yang dilakukan menggunakan *purposive sampling* terhadap perusahaan non finansial yang terdaftar pada BEI dari tahun 2008-2009. Terdapat 140 perusahaan yang dijadikan sampel dan pada penelitian ini pengujian hipotesis menggunakan analisa regresi logistik dengan hasil variabel reputasi auditor dan ukuran perusahaan (variabel kontrol) berhubungan signifikan dengan RMC yang tergabung dengan komite audit. Sedangkan variabel frekuensi rapat dan ukuran perusahaan (variabel kontrol) berhubungan signifikan dengan RMC yang tergabung dengan komite audit.

Tabel 2.2

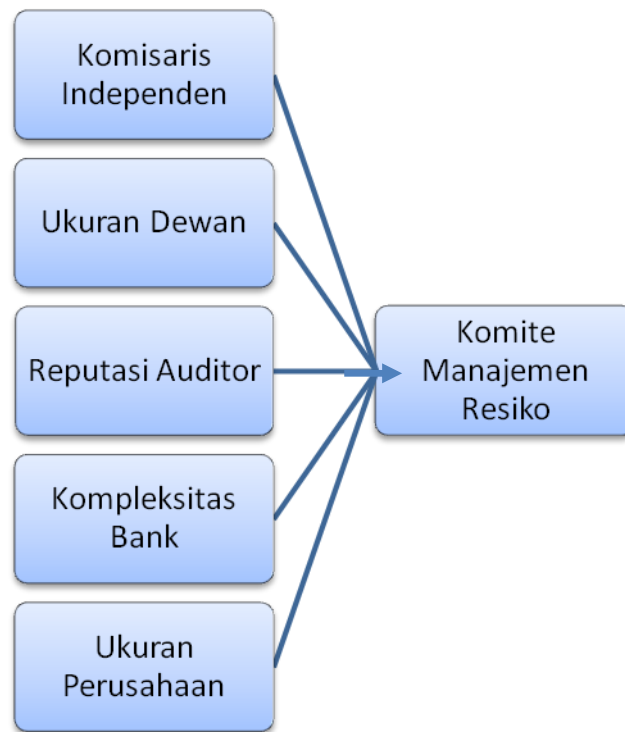
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Variabel Dependen	Variabel Independen	Hasil
1	Subramaniam et,al (2009)	Keberadaan RMC dan Tipe RMC	Karakteristik dewan dan karakteristik perusahaan	RMC yang berada pada perusahaan dengan CEO Independen dan ukuran dewan yang lebih besar, RMC yang terpisah dan komite audit secara signifikan. Berhubungan positif dengan ukuran dewan dan resiko pelaporan keuangan
2	Yatim (2009)	Pembentukan RMC dan struktur dewan	Proporsi komisaris independen, CEO independen, keahlian dewan dan kerajinan dewan	Proporsi komisaris independen dan CEO independen berhubungan positif dengan RMC yang terpisah dari komite audit.

3	Andarini & Januarti (2010)	Keberadaan RMC dan Keberadaan RMC yang terpisah dari audit dan berdiri sendiri	Proporsi komisaris independen, ukuran dewan, auditor eksternal perusahaan, kompleksitas, risiko pelaporan keuangan, leverage, ukuran perusahaan	Variabel komisaris independen tidak berhubungan signifikan pada keberadaan RMC, Variabel ukuran dewan tidak berhubungan signifikan pada keberadaan RMC dan SRMC, Variabel reputasi auditor tidak berhubungan signifikan terhadap RMC dan SRMC, Variabel kompleksitas tidak berhubungan signifikan terhadap RMC dan SRMC, Variabel kompleksitas tidak berhubungan signifikan terhadap RMC dan SRMC, Variabel leverage tidak berhubungan signifikan terhadap RMC dan SRMC, dan Ukuran perusahaan berhubungan signifikan terhadap RMC dan SRMC.
4	Briana Dita Pratika (2011)	Keberadaan <i>Risk Management Committee</i> Terhadap Manajemen Resiko (Pada Perusahaan Yang Listing di BEI)	Variabel komisaris independen, ukuran dewan, <i>big four auditor</i> eksternal, segmen bisnis, proporsi piutang dagang dan persediaan, proporsi hutang jangka panjang dan ukuran dewan.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen yang berpengaruh secara signifikan terhadap keberadaan RMC yang tergabung dengan komite audit adalah variabel reputasi auditor.
5	Yudiati Indah Setyarini (2011)	Pengungkapan <i>Risk Management Committee</i>	Komisaris independen, ukuran dewan, frekuensi rapat, reputasi auditor, risiko pelaporan keuangan, kompleksitas, leverage	Untuk RMC yang tergabung dengan komite audit, variabel reputasi auditor dan variabel kontrol ukuran perusahaan berpengaruh signifikan. Sedangkan untuk RMC yang terpisah, variabel frekuensi audit dan variabel kontrol ukuran perusahaan berpengaruh signifikan.

2.3 Kerangka Pemikiran penelitian

Dalam penelitian ini akan diuji faktor-faktor yang mempengaruhi keberadaan *Management Risk Committee* pada perbankan di Indonesia yang sudah terdaftar pada BEI. Variabel yang digunakan terdiri dari dua yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen terdiri atas lima faktor yaitu pengaruh proporsi komisaris independe, pengaruh ukuran dewan, pengaruh reputasi auditor, pengaruh kompleksitas bank, pengaruh ukuran perusahaan. Berdasarkan uraian faktor-faktor yang mempengaruhi keberadaan *Management Risk Committee* maka kerangka pemikiran penelitian dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.3

Kerangka Pemikiran

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap RMC

Proporsi anggota independen dalam dewan komisaris dapat dikatakan sebagai indikator independensi dewan dari manajemen (Andarini dan Januarti, 2010). Kehadiran komisaris independen dapat meningkatkan independensi dewan komisaris terhadap kepentingan pemegang saham (mayoritas) dan benar-benar menempatkan kepentingan perusahaan di atas kepentingan lainnya (Muntoro, 2006). Perusahaan dengan komisaris independen memiliki agency cost yang rendah, karena dengan adanya komisaris independen lebih baik dalam mengontrol para manajer (Subramaniam et al, 2009). Diperkirakan dengan adanya komisaris

independen keberadaan komite manajemen resiko dapat berjalan dengan efisien. Dalam penelitian Subramaniam et al (2009) , Andarini dan Januarti (2010) ditemukan bahwa komisaris idependen tidak berpengaruh signifikan pada perusahaan yang listing di bursa efek.

H0₁ : Komisaris Independen tidak berhubungan positif dengan keberadaan RMC

Ha₁ : Komisaris Independen memiliki hubungan positif dengan keberadaan RMC

2.4.2 Pengaruh Ukuran Dewan terhadap RMC

Dalam penelitian Subramaniam, et al. (2009) menyatakan bahwa ukuran dewan berhubungan positif dengan keberadaan RMC.

H0₂ : Ukuran Dewan tidak berhubungan positif dengan keberadaan RMC

Ha₂ : Ukuran Dewan memiliki hubungan positif dengan keberadaan RMC

2.4.3 Pengaruh Reputasi Auditor

Dengan adanya komite manajemen resiko dapat bersama-sama dengan auditor eksternal yang memiliki reputasi tinggi seperti auditor big four dapat meminimalisasikan kerugian maupun resiko.

Perusahaan audit yang tergabung dalam Big Four dapat meningkatkan kualitas mekanisme pengawasan internal kliennya dibandingkan dengan auditor non Big Four (Cohen (2004) dalam Subramaniam et al., 2009).

H0₃ : Reputasi Auditor tidak berhubungan positif dengan keberadaan RMC

Ha₃ : Reputasi Auditor memiliki hubungan positif dengan keberadaan RMC

2.4.4 Pengaruh Kompleksitas Bank

Dalam Peraturan Bank Indonesia 5/8/PBI/2003 dijelaskan bahwa pembentukan komite manajemen resiko ditentukan dengan kompleksitas bank tersebut. Kompleksitas dapat dilihat dari jumlah segmen bisnis yang dimiliki bank tersebut, sehingga dapat meningkatkan resiko dalam level yang berbeda, termasuk resiko operasional dan teknologi yang dibutuhkan mekanisme pengawasan resiko yang lebih besar (Subramaniam, et al., 2009).

H0₄ : Kompleksitas usaha bank tidak berhubungan positif dengan keberadaan RMC

Ha₄ : Kompleksitas usaha bank memiliki hubungan positif dengan keberadaan RMC

2.4.5 Pengaruh Ukuran Perusahaan

Selain kompleksitas bank, ukuran perusahaan atau bank menentukan pembentukan komite manajemen resiko di dalam bank tersebut. Karena perusahaan yang besar berpotensi memiliki masalah agensi yang lebih besar, karena lebih sulit melakukan tindakan monitoring (Fitdiani, 2009 dalam Andarini dan Januarti, 2010). Ukuran perusahaan yang besar dapat diartikan memiliki resiko yang besar, sehingga perusahaan tersebut mengadopsi praktek corporate governance dengan lebih baik. Hal ini terkait dengan tanggung jawab perusahaan terhadap pemegang saham yang memiliki kepemilikan terhadap perusahaan tersebut. Sehingga ukuran perusahaan akan menentukan keberadaan komite manajemen resiko.

H0₅ : Ukuran Perusahaan tidak berhubungan positif dengan keberadaan RMC

Ha₅ : Ukuran Perusahaan berhubungan positif dengan keberadaan RMC

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan statistik deskriptif , karena memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan kemencengan distribusi (Ghozali, 2011). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberadaan *Risk Management Committee* pada perbankan di Indonesia.

Objek yang ingin diteliti adalah industri perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Periode pengamatan dilakukan pada tahun 2009 untuk setiap laporan keuangan yang tersedia di perbankan tersebut.

3.2 Metode Pengumpulan Data

3.2.1 Metode Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*, yaitu sampel atas dasar kesesuaian karakteristik sampel dalam kriteria pemilihan sampel yang telah ditentukan. Kriteria yang digunakan untuk menentukan sampel adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan yang berasal dari kelompok industri finansial yang terdaftar di BEI
2. Bank yang menyediakan laporan tahunan lengkap di BEI pada tahun 2009
3. Bank yang mempublikasikan laporan keuangan tahunan untuk periode 31 Desember 2009 yang dinyatakan dalam rupiah (Rp)

3.2.2 Jenis dan Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan tahunan perbankan pada tahun 2009. Adapun data sekunder yang dibutuhkan dari laporan tahunan adalah keberadaan komite manajemen resiko atau RMC yang terdiri dari keberadaan proposi komisaris independen, ukuran dewan, reputasi auditor, kompleksitas perbankan dan ukuran perusahaan. Sumber data diperoleh dari website resmi BEI <http://idx.co.id> dan website resmi dari Bank yang bersangkutan.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis data yang diperlukan yaitu data sekunder yang didapat dari situs resmi IDX, berupa laporan keuangan (*annual report*) dari perusahaan finansial atau Bank yang sudah terdaftar pada IDX.

3.3 Teknik Pengolahan Data

3.3.1 Model Penelitian

Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis pada penelitian ini adalah regresi logistik (*logistic regression*) untuk menguji apakah probabilitas terjadinya variabel terikat dapat diprediksi dengan variabel bebasnya (Ghozali, 2011).

$$\text{Logit (RMC)} = \alpha + \beta_1(\text{NONEXECDIR}) + \beta_2 (\text{BOARDSIZE}) + \beta_3 (\text{BIGFOUR}) + \beta_4(\text{BUSSEGMENT}) + \beta_5 (\text{SIZE}) + e.$$

Dimana :

RMC	= Keberadaan RMC atau komite manajemen resiko (variabel dummy, nilai 1 untuk Bank yang memiliki RMC dan nilai 0 untuk sebaliknya)
α	= konstanta
NONEXECDIR	= Proporsi komisaris independen
BOARDSIZE	= Ukuran dewan
BIGFOUR	= Variabel dummy auditor eksternal (nilai 1 untuk auditor Bigfour dan 0 untuk sebaliknya)
BUSSEGMENT	= Kompleksitas
SIZE	= Ukuran perusahaan
E	= Error

3.3.2 Operasionalisasi Variabel

Setelah data – data yang diperlukan terkait dengan Komite Manajemen Resiko atau RMC maka data – data tersebut selanjutnya akan dioleh dengan melakukan beberapa langkah, sebagai berikut :

- Variabel bebas (*Independent variable = X*)
 - 1.) Proposi Komisaris Independen.

Dalam laporan keuangan yang diterbitkan setiap tahunnya, terdapat informasi mengenai komposisi Dewan Komisaris baik yang berasal dalam perusahaan tersebut maupun dari pihak luar (independen). Proposi Komisaris Independen diukur dari jumlah Komisaris Independen dibagi dengan jumlah

Komisaris pada suatu bank. Komposisi Dewan Komisaris Independen ini disajikan dalam bentuk presentase.

Rumus komposisi dewan komisaris =

$$\frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Dewan Komisaris}}$$

2.) Data Ukuran Dewan

Ukuran Dewan Komisaris dalam penelitian ini diperoleh dengan menjumlahkan komisaris yang berasal dalam perusahaan dan juga komisaris dari pihak luar (independen) dalam suatu bank. Data ukuran dewan komisaris disajikan dalam bentuk jumlah atau nominal.

3.) Data Auditor Eksternal

Untuk memperoleh data mengenai auditor eksternal dapat diperoleh dengan melihat auditor yang mengaudit laporan keuangan bank tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan variabel dummy, yaitu jika bank menggunakan auditor *BigFour* maka diberikan nilai 1 dan 0 jika tidak memakai jasa auditor *BigFour*.

4.) Data Kompleksitas Bank

Data ini diperoleh dengan menganalisis dan menjumlahkan anak perusahaan dari Bank tersebut. Anak perusahaan dapat berupa: jasa dan layanan pasar modal, perbankan syariah, asuransi jiwa, UMKM, jasa pembiayaan, asuransi umum.

5.) Data Ukuran Perusahaan

Data ini diperoleh dengan melihat total aktiva yang dimiliki suatu bank. Agar tidak terjadi ketimpangan yang besar antara bank yang berukuran besar dan bank yang berukuran kecil, maka data total aktiva disajikan dalam bentuk logaritma natural. Penggunaan nilai LN total aset untuk menghindari data yang timpang.

- Variabel terikat (*Dependent variabel = Y*)

Dalam penelitian ini variabel dependennya adalah Komite Manajemen Resiko atau RMC. Data ini diperoleh dengan melihat apakah bank tersebut membentuk komite manajemen resiko yang dilihat dari laporan keuangan bank mengenai manajemen resiko. Data menggunakan variabel dummy, jika bank membentuk RMC maka dinilai 1 dan 0 untuk sebaliknya.

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan setelah pengolahan data-data terkait dengan Komite Manajemen Resiko atau RMC . Dalam penelitian ini menggunakan software SPSS versi 17.0 digunakan untuk pengujian hipotesis. Secara singkat variabel-variabel yang terdapat pada penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 3.1

Operasionalisasi Variabel

No	VARIABEL	KONSEP VARIABEL	INDIKATOR
Independen :			
1	Proporsi Komisaris Independen	Jumlah anggota Dewan Komisaris Independen terhadap total anggota Dewan Komisaris	Presentase jumlah anggota Dewan Komisaris Independen dari total anggota Dewan Komisaris

2	Ukuran Dewan	Jumlah anggota Dewan Komisaris dalam suatu Bank	Jumlah anggota Dewan Komisaris dalam suatu bank
3	Auditor Eksternal	Auditor eksternal merupakan <i>BigFour</i>	Menggunakan variabel dummy, nilai 1 untuk auditor <i>BigFour</i> dan 0 untuk sebaliknya
4	Kompleksitas Bank	Jumlah produk maupun jasa Bank	Jumlah produk maupun jasa Bank
5	Ukuran Perusahaan	Ukuran perusahaan suatu Bank	Nilai <i>Logaritma Natural</i> dari jumlah aktiva yang dimiliki suatu Bank
Dependen			
1	Komite Manajemen Resiko atau RMC	Penerapan RMC pada Bank	Menggunakan variabel dummy, nilai 1 untuk Bank yang memiliki RMC dan 0 untuk sebaliknya

3.4 Metode Analisis Data

Pengujian yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.4.1 Statistik Deskriptif

Analisa statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atas variabel-variabel yang diuji coba dalam penelitian. Gambaran yang dimaksud seperti distribusi frekuensi, nilai maksimum, minimum, rata-rata dan standar deviasi dari variable bebas lainnya.

Untuk variabel proposi komisaris independen, ukuran dewan, dan ukuran perusahaan dapat diketahui nilai maksimum, minimum, rata-rata, standar deviasi dari setiap variabel.

Sedangkan untuk variabel reputasi auditor dan kompleksitas tidak menggunakan statistik deskriptif karena memiliki skala nominal, menurut Ghozali (2005) skala nominal merupakan skala pengukuran. Jadi dalam analisis deskriptif untuk variabel kategori tersebut dinilai atas jumlah frekuensi masing-masing variabel.

3.4.2 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah menggunakan model analisis regresi logistik. Menurut Ghozali (2005), regresi logistik mirip dengan analisis deskriminan yaitu menguji apakah probabilitas terjadinya terikat dapat diprediksi dengan variabel bebasnya. Dalam penelitian ini variabel terikat merupakan variabel kategorial atau variabel dummy, dimana diberi nilai 1 dan 0. Dan variabel bebas merupakan campuran dari variabel metrik dan variabel non-metrik. Menurut Ghozali (2005), asumsi multivariate normal distribusi tidak dapat dipenuhi karena variabel bebas merupakan campuran bebas antara variabel metrik dan non-metrik, oleh sebab itu regresi logistik digunakan jika asumsi multivariate normal distribusi tidak dapat dipenuhi.

Dalam model pengujian analisis regresi logistik untuk menguji apakah variabel komisaris independen, ukuran dewan, reputasi auditor, kompleksitas dan ukuran perusahaan memiliki hubungan yang signifikan atas *Risk Management Committee* pada perbankan di Indonesia.

Menurut Ghozali (2005) dinyatakan bahwa regresi logistik tidak memerlukan uji normalitas, heteroskedastisitas dan uji asumsi klasik pada variabel independennya. Dikarenakan variabel independen merupakan campuran atas variabel metrik dan non-metrik, sehingga asumsi multivariate normal distribusi tidak dapat dilakukan.

Pengujian atas model regresi logistic adalah sebagai berikut :

1. Menilai Kelayakan Model Regresi (*Goodness of Fit Test*)

Dalam pengujian kelayakan model regresi dapat dilihat dengan tiga kriteria, yaitu:

- Pengujian *Hosmer and Lemeshow*

Pengujian kelayakan model regresi logistik dilakukan dengan menggunakan *goodness of fit test* yang dapat dilihat dari R^2 ataupun F test. Penilaian model regresi logistic dapat dilihat dari pengujian *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test*. Apabila nilai probabilitas (sig.) pada uji *Hosmer and Lemeshow Goodness of Fit Test* $\leq 0,05$ maka H_0 ditolak. Dan jika $>0,05$ maka H_0 diterima dan berarti model mampu memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan model dapat diterima sesuai dengan data observasinya (Ghozali,2006).

H_0 : Tidak ada perbedaan yang nyata antara klasifikasi yang diprediksi dengan yang diamati

H_1 : Ada perbedaan yang nyata antara klasifikasi yang diprediksi dengan yang diamati

- *Nagalgarke R-Square*

Cox and Snell's R-Square merupakan ukuran yang mencoba meniru ukuran R^2 pada multiple regression yang didasarkan pada teknik estimasi likelihood dengan nilai maksimum kurang dari satu sehingga sulit untuk diinterpretasikan (Ghozali, 2005). Lebih lanjut, *Nagalgarke R-Square*

merupakan modifikasi dari koefisien *Cox and Snell* untuk memastikan bahwa nilai bervariasi dari nol sampai satu.

Nilai dari *Nagelkerke R-Square* untuk mengetahui seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Selisih dari nilai *Nagelkerke R-Square* merupakan variabel lain untuk menjelaskan variabel dependen.

- *Classification Plot*

Dalam *classification table* akan terdapat dua nilai prediksi dari variabel dependen yaitu nilai 1 dan 0. Pada model yang sempurna maka semua kasus akan berada pada diagonal yang sama dengan tingkat ketepatan peramalan 100% (Ghozali, 2005).

Hasil dari *Classification Plot* adalah untuk menjelaskan seberapa banyak yang mampu ditebak dari variabel dependen.

2. Menilai Keseluruhan Model (*Overall Test*)

Untuk menilai keseluruhan model (*overall model fit*) ditunjukkan dengan *Log likelihood value* (nilai $-\text{LogL}$) yaitu dengan cara membandingkan antara lain -2LogL pada awal (*block number* = 0), dimana model hanya memasukkan konstanta dengan nilai -2LogL , pada saat *block number* = 1, dimana model hanya memasukkan konstanta dan variabel bebas.

Apabila nilai $-2\text{LogL Block Number}= 0 >$ nilai $-2\text{LogL Block Number}=1$, maka menunjukkan model regresi yang baik. *Log likelihood* pada regresi logistik

mirip dengan pengertian “*Sum of Square Error*” pada model regresi, sehingga penurunan *log likelihood* menunjukkan model yang semakin baik.

Untuk menentukan *overall test* dapat diketahui dengan mengurangi nilai dari -2LogL block number = 0 dengan -2LogL block number =1. Kemudian selisih tersebut akan tertera pada *Omnibus Tests of Model Coefficients*. Dalam hasil tersebut terdapat nilai signifikansi terhadap seluruh variabel independen yang diuji.

H0 : Tidak ada variabel independen yang signifikan mempengaruhi variabel dependen

H1 : Terdapat minimal satu variabel independen yang signifikan mempengaruhi variabel dependen

3. Menguji Koefisien Regresi

Pengujian koefisien regresi dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tingkat signifikansi α yang digunakan 5% - 10%
2. Kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis didasarkan pada nilai p value.

Dalam menguji koefisien regresi atau *partial test* untuk menilai masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Maka hipotesa untuk setiap variabel adalah sebagai berikut:

- Komisaris Independen

H0₁ : Variabel tidak signifikan mempengaruhi variabel RMC

Ha₁ : Variabel berpengaruh signifikan terhadap variabel RMC

- Ukuran Dewan

H0₂ : Variabel tidak signifikan mempengaruhi variabel RMC

Ha₂ : Variabel berpengaruh signifikan terhadap variabel RMC

- Reputasi Auditor

H0₃ : Variabel tidak signifikan mempengaruhi variabel RMC

Ha₃ : Variabel berpengaruh signifikan terhadap variabel RMC

- Kompleksitas

H0₄ : Variabel tidak signifikan mempengaruhi variabel RMC

Ha₄ : Variabel berpengaruh signifikan terhadap variabel RMC

- Ukuran Perusahaan

H0₅ : Variabel tidak signifikan mempengaruhi variabel RMC

Ha₅ : Variabel berpengaruh signifikan terhadap variabel RMC

Apabila nilai probabilitas (sig) > α maka hipotesis diterima, yang berarti variabel-variabel tersebut berpengaruh terhadap keberadaan RMC. Sedangkan apabila nilai probabilitas (sig) < α maka H0 ditolak.

Dengan demikian model analisis regresi logistic adalah sebagai berikut :

$$\ln \left(\frac{\text{RMC}}{1-\text{RMC}} \right) = \alpha + \beta_1(\text{NONEXECDIR}) + \beta_2 (\text{BOARDSIZE}) + \beta_3 (\text{BIGFOUR}) + \beta_4(\text{BUSSEGMENT}) + \beta_5 (\text{SIZE}) + e.$$

Keterangan :

RMC = Keberadaan RMC

1-RMC = Tidak ada keberadaan RMC

α = konstanta

NONEXECDIR = Proporsi komisaris independen

BOARDSIZE = Ukuran dewan

BIGFOUR	= Variabel dummy auditor eksternal (nilai 1 untuk auditor Bigfour dan 0 untuk sebaliknya)
BUSSEGMENT	= Kompleksitas
SIZE	= Ukuran perusahaan
E	= Error

BAB IV
ANALISIS & PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

Obyek pada penelitian ini adalah Perbankan di Indonesia yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia periode 2009 - 2011. Dengan menggunakan metode *purposive sampling* terdapat 29 bank yang menjadi sample pada penelitian ini. Tabel 4.1 menjelaskan mengenai pemilihan sampel untuk penelitian.

Tabel 4.1

Perhitungan Pemilihan Sampel

Keterangan	Jumlah
Jumlah Bank yang terdaftar pada BEI	31
Periode penelitian 2009-2010	3
Total sampel penelitian	93

Sumber : Data olahan (*Indonesia Stock Exchange*)

Dalam tabel 4.1 diketahui bahwa obyek penelitian ini adalah 93 Bank, dimana menggunakan dua periode yaitu tahun 2009 - 2011. Maka jumlah sampel dalam penelitian menjadi 93 sampel. Berikut nama 31 Bank yang menjadi sampel penelitian.

Tabel 4.2

Daftar Perbankan

No.	Nama Bank
1	Bank Aroniaga Tbk
2	Bank Artha Graha Internasional Tbk
3	Bank Bukopin

4	Bank Central Asia Tbk
5	Bank CIMB Niaga Tbk
6	Bank Danamon Indonesia Tbk
7	Bank ICB Bumiputera Tbk
8	Bank Internasional Indonesia Tbk
9	Bank Kesawan Tbk
10	Bank Mandiri Tbk
11	Bank Mayapada Internasional Tbk
12	Bank Mega Tbk
13	Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
14	Bank Nusantara Parahyangan Tbk
15	Bank OCBC NISP Tbk
16	Bank Permata Tbk
17	Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
18	Bank Sinar Mas
19	Bank Swadesi Tbk
20	Bank Tabungan Pensiunan Nasional
21	Bank Victoria Internasional Tbk
22	PAN Indonesia Bank Tbk
23	PT Bank Bumi Artha
24	PT Bank Capital Indonesia
25	PT Bank Ekonomi Rahaja Tbk
26	PT Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk
27	PT Bank Mutiara Tbk
28	PT Bank Pundi Indonesia Tbk
29	PT Bank Tabungan Negara
30	Bank Pembanguna Daerah Jawa Barat
31	Bank Windu Kenjtana International

Sumber : Hasil olahan

4.2 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis data deskriptif memberikan hasil gambaran masing-masing variabel dalam penelitian mengenai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi.

Tabel 4.3

Hasil Data Deskriptif

	Sampel	Min.	Maks.	Rata-Rata	Std. Deviasi
Komisaris Independen	93	0,00	1,00	0,5104	0,18960

Ukuran Dewan	93	2	9	4,97	1,778
Ukuran Bank	93	21,08	27,04	23,8602	1,68306

Sumber : Hasil SPSS 17.0

Hasil dari data deskriptif menyajikan nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi dari masing-masing variabel yang mempengaruhi keberadaan *Risk Managemen Committee* sebagai variabel dependen. Dalam variabel independen (variabel X) terdapat dua variabel yang merupakan variabel kategori, yaitu variabel Reputasi Auditor dan variabel Kompleksitas. Dalam variabel kategori hanya berisi nilai 1 untuk positif/ada/ya dan nilai 0 untuk sbeliknya. Maka nilai maksimum, minimum, rata-rata, serta standar deviasi tidak digunakan.

Komisaris Independen merupakan presentase dari komisaris independen dibagi dengan jumlah komisaris pada Bank tersebut. Nilai minimum pada data ini adalah 0, yang berarti tidak terdapat sama sekali komisaris independen pada Bank tersebut. Dan angka 1 untuk nilai maksimum, menunjukkan bahwa seluruh anggota dewan komisaris dalam Bank tersebut merupakan komisaris independen. Nilai rata-rata dalam data adalah sebesar 0,5104 hal ini berarti perbandingan antara dewan komisaris independen dan jumlah dewan komisaris proposional.

Ukuran dewan didapat dari jumlah dewan direksi yang terdapat dalam organisasi Bank. Dengan nilai maksimum dewan komisaris pada data adalah 9 orang, dan minimum sebesar 2 orang. Rata-rata ukuran dewan adalah sebesar 4,97 atau 5 orang, dengan standar deviasi sebesar 1,778.

Ukuran Perusahaan diperoleh dengan menjumlahkan aktiva setiap Bank. Dalam penelitian ini agar nilai dari aktiva tidak terlalu besar perbedaannya maka nilai aktiva di ln normal. Nilai maksimum adalah sebesar 27,04 yang merupakan bank dengan aset terbesar di

Indonesia. Nilai minimum dalam ukuran perusahaan adalah sebesar 21,08 dan nilai rata-rata bank adalah 23,8602. Standar deviasi untuk ukuran perusahaan adalah sebesar 1,68306.

Untuk melihat gambaran umum sampel mengenai reputasi auditor dan kompleksitas bank dapat dilihat pada Tabel 4.4 dan Tabel 4.5 *frequency table* berikut:

Tabel 4.4
Reputasi Auditor

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Non Big Four	36	38.7	38.7	38.7
	BigFour	57	61.3	61.3	100.0
	Total	93	100.0	100.0	

Sumber : Hasil SPSS 17.0

Untuk Bank yang menggunakan jasa auditor *Big Four* diberikan nilai 1 dan 0 untuk sebaliknya. Maka dari total 93 sampel, terdapat 57 sampel (61,3%) menggunakan jasa auditor *Big Four* dan 36 sampel (38,7%) menggunakan jasa *Non Big Four* auditor.

Tabel 4.5
Kompleksitas

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Kompleks	44	47.3	47.3	47.3
	Kompleks	49	52.7	52.7	100.0
	Total	93	100.0	100.0	

Sumber : Hasil SPSS 17.0

Dalam penelitian ini, Bank dengan kompleksitas tinggi dinilai dari jumlah anak perusahaan yang dimiliki. Jika memiliki anak perusahaan lebih dari satu maka memiliki kompleksitas Bank dan diberi nilai 1. Dan jika tidak memiliki sama sekali anak perusahaan maka diberi nilai 0 pada kompleksitas Bank. Hasil yang didapat adalah terdapat 49 sampel (52,7%) Bank yang kompleksitas dan sisanya adalah 44 sampel (47,3%).

4.3 Pengujian Hipotesis

4.3.1 Menilai Kelayakan Model Regresi (*Goodness Of Fit*)

Terdapat tiga kriteria untuk menilai kelayakan model regresi secara statistik. Yaitu dengan melihat hasil SPSS dari pengujian *hosmer and lemeshow test*, pengujian *negalgarke R-square*, dan *classification plot*.

4.3.1.1 *Hosmer And Lemeshow*

Langkah pertama adalah menilai kelayakan model regresi, hasil dapat dilihat pada Tabel 4.6 *Hosmer and Lemeshow Test*. Dimana :

H0 : Model telah cukup mampu menjelaskan data

H1 : Model tidak cukup menjelaskan data

Tabel 4.6

Hosmer and Lemeshow Test

Hosmer and Lemeshow Test			
Step	Chi-square	df	Sig.
1	5.764	8	.674

Sumber : Hasil SPSS 17.0

Nilai Statistik *Hosmer and Lemeshow goodness of fit* adalah sebesar 5,764 dengan probabilitas signifikan sebesar 0,674. Maka H_0 tidak dapat ditolak, karena $0,674 > 0,05$. Hal ini berarti model cukup menjelaskan data dan model regresi dalam penelitian ini layak untuk dipergunakan dalam analisis selanjutnya.

4.3.1.2 *Nagelkerke R-Square*

Dalam tabel 4.7 nilai *Cox & Snell R Square* adalah sebesar 23,3% dan *Nagelkerke R Square* sebesar 45,1%, yang berarti variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel independen sebesar 45,1%.

Tabel 4.7

Nagelkerke R-Square

Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	42.384 ^a	.238	.460

Sumber : Hasil SPSS 17.0

4.3.1.2 *Classification Plot*

Dalam Tabel 4.8 terdapat 11 Bank (18,2%) yang tidak membentuk *Risk Management Committee* dan terdapat 82 Bank (96,3%) yang membentuk *Risk Management Committee*. Maka ketepatan model ini adalah sebesar 87,1%.

Tabel 4.8

Classification Plot

Observed		Predicted		
		RMC		Percentage Correct
		0	1	
Step 1	RMC 0	2	9	18.2
	1	3	79	96.3
	Overall Percentage			87.1

Sumber : Hasil SPSS 17.0

4.3.2 Menilai Keseluruhan Model (*Overall Tets*)

Tahap selanjutnya adalah menilai keseluruhan model, ditunjukkan dengan melihat statistic -2LogL pada dua output SPSS. Dalam output pertama -2LogL block number = 0 sebesar 67,607 dan -2LogL block number = 1 adalah sebesar 42,384. Adanya penurunan dari output pertama dan kedua sebesar 25,223 dengan tingkat signifikansi 0,00 menjelaskan bahwa H0 tidak dapat ditolak. Karena signifikansi < 5% , dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.8

Overall Test

Omnibus Tests of Model Coefficients

		Chi-square	df	Sig.
Step 1	Step	25.223	5	.000
	Block	25.223	5	.000
	Model	25.223	5	.000

Sumber : Hasil SPSS 17.0

Maka dari hasil *overall test* , dalam penelitian ini terdapat variabel bebas yang dapat mempengaruhi variabel dependen. Hasil signifikansi secara statistik ini menjelaskan bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini merupakan model yang baik.

4.3.3 Hasil Regresi Logistik

Setelah lulus uji kelayakan model dan menilai keseluruhan model, tahap selanjutnya adalah dengan menguji *partial test* dari masing-masing variabel. Dalam Tabel 4.9 *Partial Test* pengujian dengan signifikansi 5% - 10%. Dari hasil SPSS maka diperoleh model regresi logistik sebagai berikut:

$$\ln (p/1-p) = -22,238 - 1,120\text{NONEXDIR} + 0,417\text{BOARDSIZE} - 0,604\text{AUDITOR} + 18,017\text{BUSSEGMENT} + 1,007\text{SIZE} + e$$

Dari hasil persamaan regresi logistic di atas dapat dilihat bahwa :

1. Komisaris Independen akan menurunkan tingkat log of odds keberadaan *Risk Management Committee* sebesar -1,120 jika variabel ukuran dewan, reputasi auditor, kompleksitas, ukuran perusahaan konstan. Dan odds keberadaan *Risk Management Committee* akan turun dengan faktor 0,326 ($e^{-1,120}$).
2. Ukuran Dewan akan meningkatkan log of odds keberadaan *Risk Management Committee* sebesar 0,417 jika variabel komisaris independen, reputasi auditor, kompleksitas, ukuran perusahaan konstan. Dan odds keberadaan *Risk Management Committee* akan naik sebesar faktor 1,517 ($e^{0,417}$).
3. Jika komisaris independen, ukuran dewan, kompleksitas, ukuran perusahaan dianggap konstan maka reputasi auditor akan menurunkan log of odds keberadaa *Risk Management Committee* sebesar -0,604 dan rasio odds (rasio hubungan

keeratan) dengan keberadaan *Risk Management Committee* turun sebesar faktor 0,547 ($e^{-0,604}$).

4. Kompleksitas akan menaikkan keberadaan *Risk Management Committee* jika komisaris independen, ukuran dewan, reputasi auditor dan ukuran perusahaan dianggap konstan maka log of odds keberadaa *Risk Management Committee* meningkat sebesar 18,017. Dan odds keberadaan *Risk Management Committee* naik sebesar faktor 6,682E7 ($e^{18,017}$).
5. Ukuran Perusahaan merupakan variabel bebas yang signifikan dengan keberadaan *Risk Management Committee*, maka ukuran perusahaan akan menaikkan log of odds keberadaan *Risk Management Committee* sebesar 1,007 jika variabel komisaris independen, ukuran dewan, reputasi auditor, dan kompleksitas konstan. Jika variabel independen selain ukuran perusahaan dianggap konstan, maka odds keberadaan *Risk Management Committee* akan meningkat dengan faktor 2,738 ($e^{1,007}$) untuk setiap kenaikan ukuran perusahaan atau jumlah asset dari bank tersebut.

4.3.4 Hasil Uji Hipotesis

Untuk menguji masing-masing variabel independen digunakan *partial test* pada penelitian ini sesuai dengan Tabel 4.9 di bawah ini:

Tabel 4.9

Partial Test

Variables in the Equation

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1 ^a NONEXCDIR	-1.120	1.449	.597	1	.440	.326

BOARDSIZE	.417	.421	.980	1	.322	1.517
AUDITOR	-.604	1.126	.288	1	.592	.547
BUSSEGMENT	18.017	5079.122	.000	1	.997	6.682E7
Ln_size	1.007	.537	3.518	1	.061	2.738
Constant	-22.238	11.914	3.484	1	.062	.000

Sumber : Hasil SPSS 17.0

H0₁ : Komisaris Independen terhadap RMC

Hasil komisaris independen menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar -1,120 dengan probabilitas variabel 0,440 lebih besar dari (α) 10% yang berarti bahwa H0₁ tidak dapat ditolak (H0₁ diterima). Maka dari hasil statistik tersebut komisaris independen tidak mempengaruhi keberadaan *Risk Management Committee*.

H0₂ : Ukuran Dewan terhadap RMC

Hasil dari ukuran dewan bahwa probabilitas variabel ukuran dewan lebih besar dari 10%, yaitu 32,2%. Maka H0₂ tidak dapat ditolak (H0 diterima) dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,417. Jadi, ukuran dewan komisaris tidak mempengaruhi keberadaan *Risk Management Committee*.

H0₃ : Reputasi Auditor terhadap RMC

Dari hasil *partial test* diketahui bahwa nilai koefisien reputasi auditor adalah sebesar -0,604 dan probabilitas variabel 0,592 lebih besar dari 10%. Maka dengan tingkat kepercayaan 95%, H0₃ ditolak (H0₃ diterima), yaitu reputasi auditor tidak memiliki pengaruh dengan keberadaan *Risk Management Committee*.

H0₄ : Kompleksitas Bank terhadap RMC

Variabel kompleksitas bank diketahui bahwa nilai koefisien regresi 18,017 dan probabilitas variabel adalah sebesar 0,997 yang berarti lebih besar dari 0,05. Dari hasil tersebut maka H0₄ tidak dapat ditolak (H0₄ diterima). Maka kompleksitas tidak memiliki pengaruh atas keberadaan *Risk Management Committee*.

H0₅ : Ukuran Perusahaan terhadap RMC

Variabel ukuran perusahaan menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi 1,077 dengan probabilitas variabel sebesar 0,067 dengan signifikansi dibawah 10%. Signifikansi hubungan antara ukuran perusahaan dengan keberadaan *Risk Management Committee* dapat dilihat juga dari hasil Wald statistik yaitu $3,518 > 1$. Maka dari hasil tersebut H0₅ ditolak yang berarti bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap keberadaan RMC.

4.4 Analisis Hasil Penelitian

Dengan melakukan pengujian tahapan pengujian *goodness of fit* dengan hasil model layak untuk melakukan pengujian selanjutnya maka pengujian tahap kedua adalah *overall test*. Dalam *overall test* menguji kelayakan seluruh variabel yang diuji, hasilnya signifikan yaitu terdapat variabel independen yang mempengaruhi keberadaan RMC (variabel dependen). *Partial test* merupakan pengujian terpisah terhadap variabel-variabel independen. Dari hasil statistik *partial test* menyatakan bahwa ukuran perusahaan merupakan satu-satunya variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen.

4.4.1 Komisaris Independen

Variabel komisaris independen tidak berhubungan signifikan pada keberadaan RMC sesuai dengan hasil statistik. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Subramaniam, et al. (2009) dan Andarin & Januarti (2010). Dengan adanya komisaris independen dapat membantu Bank membentuk Komite Pemantau Resiko yang memiliki tugas mengevaluasi dan juga membentuk *Risk Management Committee*. Dengan data penelitian yang didapat dari 93 sampel, diketahui bahwa beberapa bank tidak memiliki komisaris independen, maka dalam analisis deskriptif minimum hasil data adalah 0. Hal ini menunjukkan bahwa Komisaris Independen tidak memiliki pengaruh terhadap keberadaan *Risk Management Committee*. Bank yang tidak memiliki komisaris independen namun dapat membentuk *Risk Management Committee* selain karena tingkat kepatuhan yang tinggi, Bank membentuk Komite Pemantau Resiko menggunakan komisaris sementara yang belum diangkat sebagai komisaris tetap.

Pengangkatan komisaris independen oleh perusahaan mungkin hanya dilakukan sebagai pemenuhan regulasi terhadap *good corporate governance* (Andarin & Januarti, 2010). Jumlah komisaris independen harus sebanding dengan jumlah komisaris yang tidak independen (Muntoro, 2006), hasil yang diperoleh dari penelitian ini rata-rata Bank memiliki proporsi yang seimbang antara komisaris independen dan yang tidak, terbukti dari analisis deskriptif sebesar 51%. Menurut pedoman *good corporate governance* bahwa paling tidak 20% anggota dewan komisaris adalah yang berasal dari perseroan, mungkin belum cukup tinggi untuk membuat komisaris independen mendominasi kebijakan yang diambil oleh dewan komisaris (Andarin & Januarti, 2009).

4.4.2 Ukuran Dewan

Dari hasil *partial test* diperoleh bahwa ukuran dewan tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap keberadaan *Risk Management Committee*. Hasil penelitian tidak sesuai dengan Subramaniam, et al.(2009) yang menyatakan bahwa ukuran dewan berpengaruh signifikan terhadap keberadaan *Risk Management Committee*. Menurut Andarin & Januarti (2010) yang memiliki hasil penelitian bahwa ukuran dewan tidak memiliki hubungan signifikan dengan *Risk Management Committee* menyatakan bahwa ukuran dewan yang besar akan menambah masalah dalam hal komunikasi dan koordinasi. Besar dan kecilnya ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap keberadaan *Risk Management Committee*.

Menurut Muntoro (2006), ukuran dewan komisaris juga ditentukan oleh resiko menyeluruh yang dihadapi perusahaan dan kemampuan dewan komisaris untuk mendeteksi adanya masalah lebih dini apabila dewan komisaris memiliki kemampuan sesuai dengan bidang. Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa dengan adanya komisaris yang semakin besar membutuhkan biaya *monitoring* yang besar.

4.4.3 Reputasi Auditor

Variabel reputasi auditor tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keberadaan *Risk Management Committee* sesuai dengan hasil SPSS. Hasil ini sesuai dengan penelitian Subramaniam, et al. (2009) ; Yatim (2009) ; Andarin&Januarti (2010). Dengan menggunakan jasa Auditor *BigFour* , opini yang didapat dari auditor tersebut atas laporan keuangan Bank dinilai lebih baik karena reputasi auditor dan juga dapat menaikkan reputasi

Bank tersebut. Auditor *BigFour* lebih menekankan Bank terhadap pengawasan resiko yang bersifat keuangan (Andarin&Januarti, 2010).

4.4.4 Kompleksitas

Variabel kompleksitas bank tidak berhubungan signifikan terhadap keberadaan *Risk Management Committee*. Hasil ini sesuai dengan penelitian Subramaniam, et al. (2009); Yatim (2009), Andarin & Januarti (2010) yang menyatakan bahwa kompleksitas tidak memiliki hubungan signifikan dengan keberadaan *Risk Management Committee*. Kompleksitas dinilai dengan proxy segmen usaha dimana dalam penelitian dilihat dari keberadaan anak perusahaan Bank tersebut.

Dengan adanya anak perusahaan, maka semakin tingginya kompleksitas dan juga adanya eksposur resiko karenanya. Anak perusahaan bukanlah proksi yang tepat untuk menentukan kompleksitas dari Bank tersebut, mungkin dengan segmen geografis atau banyaknya KCP dapat menentukan semakin kompleksitasnya Bank tersebut.

4.4.5 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan berhubungan signifikan dengan keberadaan *Risk Management Committee* pada perbankan di Indoensua. Hasil peneliian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Andarin & Januari (2010) ; Yudiati Indah (2011) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berhubungan signifikan dengan keberadaan *Risk Management Committee*. Dalam penelitian ini beberapa bank dengan ukuran perusahaan kecil (jumlah aset sedikit) tidak membentuk *Risk Management Committee* dimungkinkan dengan alasan bahwa Bank tersebut tidak memiliki tingkat resiko yang tinggi. Hasil ini menunjukkan bahwa perbankan

di Indonesia dengan biaya agensi lebih tinggi akan membentuk *Risk Management Committee*.

4.5 Implikasi Manajerial

Keberadaan *Risk Management Committee* dapat membantu direksi utama untuk memberikan rekomendasi atas kebijakan resiko, strategi dan aplikasi. Pembentukan dari komite tersebut diharapkan dapat membantu Bank Indonesia untuk mengawasi perbankan di Indonesia melalui pelaporan yang terkait dengan manajemen resiko.

Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa faktor komisaris independen, ukuran dewan, reputasi auditor dan kompleksitas tidak memiliki hubungan dengan keberadaan *Risk Management Committee*. Ukuran perusahaan memiliki hubungan yang signifikan dengan keberadaan komite tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi aset Bank, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan dan pengawasan terhadap resiko-resiko dalam bank. Untuk Bank dengan aset yang rendah diharapkan segera membentuk *Risk Management Committee* sebagai bentuk kepatuhan terhadap Bank Indonesia dan juga bentuk pengawasan yang lebih ketat terhadap resiko Bank. Karena dengan adanya *good corporate governance* menekankan pada transparansi bank.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil uji model analisis regresi logistik pada penelitian ini dapat ditarik kesimpulan, bahwa :

1. Komisaris Independen tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan keberadaan *Risk Management Committee* pada perbankan di Indonesia.
2. Ukuran Dewan tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan keberadaan *Risk Management Committee*, hal ini menunjukkan bahwa besar dan kecilnya ukuran dewan tidaklah mempengaruhi pembentukan komite.
3. Reputasi Auditor tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan keberadaan *Risk Management Committee*, dengan menggunakan jasa Auditor *BigFour* maupun auditor *Non BigFour* tidak mempengaruhi keberadaan *Risk Management Committee*.
4. Kompleksitas tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan keberadaan *Risk Management Committee*, hal ini dikarenakan proksi keberadaan anak perusahaan yang dimiliki bank menentukan kompleksitas dari Bank.
5. Ukuran Perusahaan memiliki hubungan yang signifikan terhadap keberadaan *Risk Management Committee*. Bank dengan asset besar memperhatikan komite-komite manajemen resiko untuk diterapkan pada Bank tersebut.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian dari kesimpulan di atas maka saran untuk penelitian mendatang adalah :

1. Komisaris Independen dan Ukuran Dewan yang tidak memiliki hubungan signifikan terhadap keberadaan *Risk Management Committee* dapat diganti dengan variabel latar belakang pendidikan dari anggota dewan.
2. Menggunakan proksi berbeda untuk mengukur kompleksitas dari Bank.
3. Melakukan *interview* ataupun kuesioner untuk mengetahui informasi yang lengkap mengenai keberadaan *Risk Management Committee*.
4. Sampel yang lebih luas akan meningkatkan hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Anthony, Robert N. & Govindarajan, Vijay. (2009). Sistem Pengendalian Manajemen (Drs. F.X. Kurniawan Tjakrawala, Penerjemah.). Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Bank Indonesia, 2003 Peraturan Bank Indonesia No 5/8/2003 tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum. Jakarta
- Belkhir, Mohamed (2009). “Board of Director Size And Performance In The Banking Industry”. *International Jurnal of Managerial Finance*. Vol. 5, No.2, 2009.
- Briana Dita Pratika (2011). “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberadaan Risk Management Committee Terhadap Manajemen Resiko.” Skripsi. Universitas Diponegoro.
- Ferry N. Idroes (2008). *MANAJEMEN RESIKO PERBANKAN: Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers, 2008.
- Gup, Benton E. & Kolari, James W. (2011). *Commercial Banking : The Management of Risk (11th Ed.)*. Prentice Hall.
- Ghozali, Imam. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS (Edisi ke-5) . Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hardanto, Sulad S. (2006). *Manajemen Resiko Bagi Bank Umum*. Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Inten, Meutia. (2004). “Pengaruh Independensi Auditor Terhadap Manajemen Laba Untuk KAP Big 5 dan Non Big 5.” *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, Vol. 17, No.3.
- Jensen, Michael C. and William H. Meckling (1976). “*Theory of The Firm : Managerial Behaviour Agency Costs and Ownership Structure*”.
- Keown, Arthur J., Martin, John D., Titman, Sheridan. (2011). *Financial Management : Principles and Applications (11th Ed.)*. Pearson Prentice Hall.
- Machfoedz, Masud. (2005). “Manajemen dan Implementasi”. Yogyakarta : BPFC.
- Putri Andarini dan Indira Januari 2010. “Hubungan Karakteristik Dewan Komisaris dan Perusahaan Terhadap Pengungkapan Risk Management Committee Pada Perusahaan Go Public Indonesia”. Simposium Nasional Akuntansi, Vol 13, Purwokerto.
- Reed, Edward W & Gill, Edward K. (1999). “*Commercial Banking (4th ed.)*”. Prentice Hall International Edition.
- Ronny Kusumo (2006). “Membangun Dewan Komisaris yang Efektif”. eprints.undip.ac.id , diakses pada tanggal 9 Mei 2012.
- Sanjaya, I Putu Sugiarta. (2008). “Auditor Eksternal, Komite Audit, dan Manajemen Laba”. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*. Vol. 11, No.1 :97-116.
- Sparta (2004), Pengaruh Data Akuntansi terhadap Beta Saham di Bursa Efek Jakarta Saat Krisis Moneter, *Jurnal Akuntansi*, Vol. 8 (2), page 167-181.
- Sparta dan Februawaty (2005), Pengaruh ROE, EPS, dan OCF terhadap harga saham industri manufacturing di Bursa Efek Jakarta, *Jurnal Akuntansi*, Vol. 9 (1), page 71-80.
- Subramaniam, Nava L. McManus, and Jiani Zhan (2009). “*Corporate Governance, Firm Characteristics, and Risk Management Committee Formation in Australia Companies*”. *Managerial Auditing Jurnal*, Vol 24 No.4, 2009.
- Sumantri Supono. “Strategi Peningkatan efektivitas Fungsi Peran Komisaris Bank Swasta Nasional”. Sespibi Angkatan XIX.

- Sounders, Anthony & Cornett, Marcial M. (2011). *Financial Institutions Management : A Risk Management Approach* (7th Ed.). McGraw/Hill International Edition.
- Tampubolon, Robert. (2004). *Manajemen Resiko*. Jakarta: Elex Media Komputiondo.
- Thomas S. Kalihatu (2006). “*Good Corporate* dan Penerapannya di Indonesia”. *Jurnal Manajemen dan Kewirasusahaan*, Vol 8, No.1, Maret 2006.
- Widigdo Sukarman (2007). “*Risk Management*, Suatu Kebutuhan bagi Pengelolaan Perbankan yang Sehat. *Jurnal Manajemen* Vol. 3, No. 1, 2007.
- Yatim, Puan (2009). “*Board Structures and The Establishment of a Risk Management Committee by Malaysian Listed Firms*”. *J Mang Gov* (2012) 14:17-36.
- Yudianti Indah Setyarini (2011). “Analisis Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan *Risk Management Committee*”. Skripsi. Universitas Diponegoro